



Pembangunan Zona Integritas Sebagai Upaya Menciptakan Wilayah Bebas Korupsi Studi Kasus: Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara

Muhammad Rafli¹, Nur Afifah^{*2}

^{1,2} Universitas Sumatera Utara, Medan, 20222, Indonesia

*Corresponding Author: nurafifah17@usu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: November 30th, 2025

Revised: December 10th, 2025

Production: December 26nd, 2025

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/sajjana/>

E-ISSN: 3090-885X

ABSTRACT

The Development of an Integrity Zone (ZI) is a bureaucratic reform strategy to achieve clean governance free from corruption, collusion, and nepotism. The Faculty of Nursing at Universitas Sumatera Utara (FKep USU) is one unit building a ZI towards a Corruption-Free Area (WBK). This study aims to describe and evaluate the ZI development process at FKep USU. The method used is descriptive-evaluative with a qualitative approach. Data was collected through interviews, observation, and documentation with informants from the ZI Team, lecturers, and students. The results were analyzed using the six leverage components (Change Management, Business Process Reorganization, Human Resource Management System Strengthening, Accountability Reinforcement, Supervision Reinforcement, and Public Service Quality Improvement) and the results components. The findings indicate that ZI development at FKep USU has been implemented procedurally but faces several obstacles in its substantive implementation. The main inhibiting factors are a lack of massive socialization, uneven commitment across all levels, and limited resources. Strengthening leadership commitment and active participation from the entire academic community is necessary to successfully achieve the WBK predicate.

Keyword: Integrity Zone, Corruption-Free Area, Bureaucratic Reform, Public Service, Faculty of Nursing USU

ABSTRAK

Pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan strategi reformasi birokrasi untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara (FKep USU) adalah salah satu unit yang membangun ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi proses pembangunan ZI di FKep USU. Metode yang digunakan adalah deskriptif-evaluatif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Tim ZI, dosen, dan mahasiswa. Hasil penelitian dianalisis menggunakan enam komponen pengungkit (Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) serta komponen hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan ZI di FKep USU telah dilaksanakan secara prosedural, namun menghadapi beberapa hambatan dalam implementasi substantifnya. Faktor penghambat utama adalah kurangnya sosialisasi yang masif, komitmen yang belum merata di semua lini, dan keterbatasan sumber daya. Diperlukan penguatan komitmen pimpinan dan partisipasi aktif dari seluruh civitas academica untuk keberhasilan mencapai predikat WBK.

Kata Kunci: Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi, Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, Fakultas Keperawatan USU



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
<https://talenta.usu.ac.id/sajjana>

1. PENDAHULUAN

Korupsi hingga saat ini masih menjadi persoalan struktural dan sistemik di Indonesia yang berdampak luas terhadap efektivitas pembangunan nasional, kualitas pelayanan publik, serta legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan tata kelola pemerintahan dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara. Menyadari urgensi permasalahan tersebut, pemerintah secara berkelanjutan mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) sebagai strategi komprehensif untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja serta pelayanan publik.

Salah satu instrumen strategis dan bersifat *quick win* dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah pembangunan Zona Integritas (ZI), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB). Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh jajarannya memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembangunan ZI menitikberatkan pada upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui implementasi enam area perubahan atau komponen pengungkit, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Implementasi Zona Integritas pada sektor pendidikan tinggi memiliki urgensi dan kompleksitas tersendiri. Perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai penyelenggara layanan pendidikan dan akademik, tetapi juga sebagai institusi pembentuk karakter, nilai moral, dan agen perubahan sosial. Oleh karena itu, praktik tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan universitas menjadi prasyarat penting dalam menanamkan nilai-nilai integritas kepada sivitas akademika. Namun, pembangunan ZI di lingkungan perguruan tinggi sering kali menghadapi tantangan yang tidak sederhana, mulai dari resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, hingga belum optimalnya internalisasi nilai integritas dalam budaya organisasi.

Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara (FKep USU) merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Universitas Sumatera Utara yang dicanangkan untuk membangun Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Sebagai institusi pendidikan yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan, FKep USU dituntut tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu menjadi teladan dalam penerapan tata kelola yang berintegritas. Proses pembangunan ZI di FKep USU tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif dan indikator penilaian, melainkan juga menuntut perubahan mendasar dalam budaya kerja, sistem pelayanan, serta pola pikir (mindset) seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting dilakukan kajian yang mendalam untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi proses pembangunan Zona Integritas di Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini berfokus pada implementasi enam komponen pengungkit dalam pembangunan ZI, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi upaya pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai dinamika pembangunan ZI di lingkungan perguruan tinggi serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi penguatan Reformasi Birokrasi di sektor pendidikan tinggi.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-evaluatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis proses pembangunan Zona Integritas (ZI) di Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara (FKep USU), sementara sifat evaluatif bertujuan menilai tingkat implementasi pembangunan ZI serta mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi ideal (das Sollen) dan kondisi empiris di lapangan (das Sein). Penelitian dilaksanakan di Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam proses pembangunan ZI. Informan penelitian meliputi pimpinan fakultas (Dekan dan Wakil Dekan), koordinator Tim ZI, penanggung jawab enam komponen pengungkit, serta perwakilan pengguna layanan, yaitu dosen dan mahasiswa, guna memperoleh perspektif yang berimbang.

Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi teknik yang mencakup wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan kunci, observasi non-partisipan terhadap fasilitas layanan, media sosialisasi ZI, dan proses pelayanan, serta studi dokumentasi dengan menelaah dokumen-dokumen pendukung seperti Surat Keputusan Tim ZI, rencana aksi, Standar Operasional Prosedur (SOP), laporan evaluasi internal, dan materi sosialisasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tahapan kondensasi data, penyajian data dalam bentuk narasi dan matriks, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

3. HASIL & PEMBAHASAN

Analisis pembangunan ZI di FKep USU didasarkan pada implementasi komponen pengungkit dan faktor penghambat

3.1 Komponen Pengungkit

Fakultas Keperawatan USU telah membentuk Tim ZI melalui SK Dekan, menyusun Rencana Aksi, dan melakukan sosialisasi awal. Sosialisasi dilakukan melalui apel pagi, pemasangan spanduk/banner, dan melalui media sosial fakultas. Komponen ini merupakan fondasi, namun implementasinya masih parsial. Sosialisasi ZI belum menyentuh seluruh lapisan civitas academica secara mendalam. Banyak mahasiswa dan bahkan sebagian dosen yang belum memahami esensi ZI dan WBK, serta peran mereka di dalamnya. Perubahan *mindset* sebagai tujuan utama manajemen perubahan belum sepenuhnya tercapai; ZI masih sering dianggap sebagai "proyek" tim kerja, bukan gerakan bersama. Ketersediaan SOP adalah langkah awal yang baik. Namun, tantangannya terletak pada konsistensi implementasi. Masih ditemukan proses layanan yang belum sepenuhnya merujuk pada SOP yang ada. Sistem digitalisasi yang dibangun juga masih perlu diintegrasikan dan disosialisasikan penggunaannya agar lebih efektif. FKep USU telah melakukan pemetaan dan penyusunan SOP untuk layanan-layanan utama (misal: layanan akademik, kemahasiswaan, legalisir). Upaya digitalisasi layanan juga telah dirintis.

Akuntabilitas kinerja masih cenderung dipahami sebagai pemenuhan dokumen administratif (pelaporan) daripada sebagai budaya kerja. Keterlibatan pimpinan dalam memantau pencapaian kinerja secara berkala (misal, melalui e-performance) sudah ada, namun belum menjadi alat evaluasi yang ketat. Pimpinan FKep USU telah memiliki Perjanjian Kinerja (PK) dengan Rektor. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah diturunkan ke level fakultas dan program studi. Pada kualitas Kualitas pelayanan menunjukkan perbaikan, terutama dari segi kecepatan berkat digitalisasi. Namun, keluhan terkait responsivitas petugas atau kejelasan alur (terutama alur digital) masih ada. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) internal telah dilakukan, tetapi tindak lanjut atas hasil SKM tersebut belum terlihat dampaknya secara signifikan. Telah ada inovasi layanan, seperti layanan akademik berbasis online untuk mengurangi tatap muka. Standar Pelayanan (SP) telah disusun dan dipublikasikan.

3.2 Faktor Penghambat

Sosialisasi Tidak Merata: Ini adalah hambatan utama. Ketidaktahuan civitas academica membuat partisipasi publik internal (pengawasan dari dalam) menjadi lemah. Faktor lainnya yaitu Budaya Kerja Lama Resistensi terhadap perubahan dan budaya kerja "seadanya" yang sulit diubah dalam waktu singkat. Selain itu juga Keterbatasan Sumber Daya finansila, Keterbatasan anggaran khusus untuk ZI (misal, untuk sosialisasi masif, pelatihan, atau reward) dan beban kerja ganda bagi Tim ZI serta Komitmen Fluktuatif yaitu Komitmen pimpinan dan staf cenderung tinggi di awal atau saat akan dinilai, namun menurun dalam implementasi harian.

4. KESIMPULAN

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi di Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara telah dilaksanakan dan menunjukkan kemajuan secara prosedural dan administratif. Enam komponen pengungkit telah mulai diimplementasikan, ditandai dengan pembentukan Tim ZI, penyusunan SOP, dan penerapan saluran pengaduan. Namun, secara substantif, implementasi ZI belum optimal dan belum berhasil mengubah budaya kerja secara menyeluruh. Perubahan masih bersifat parsial dan top-down. Hambatan utama terletak pada aspek Manajemen Perubahan (sosialisasi yang tidak masif dan resistensi budaya) dan Penataan Sistem Manajemen SDM (sistem reward yang belum memotivasi).

Untuk berhasil meraih predikat WBK, diperlukan re-orientasi dari sekadar pemenuhan dokumen (check-list) menjadi perubahan mindset yang nyata. Rekomendasi utama adalah penguatan komitmen pimpinan secara berkelanjutan (bukan seremonial), strategi sosialisasi yang masif dan kreatif yang menyasar langsung mahasiswa dan dosen, serta penguatan sistem reward and punishment yang adil bagi seluruh SDM di FKep USU.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abe Alexander. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif. Yogyakarta; Pustaka. Jogja Mandiri.
- Agus Dody Sugiarto. 2013. Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kota Solo, Pendekatan Pembangunan Nguwongke Wong. IPGI
- Anthony, R., Vijay Govindarajan, 2005. Management Control System, Jilid I dan II, Terjemahan Kurniawan Tjakrawala dan Krista, Penerbit Salameb Empat, Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2009. Pedoman Evaluasi dan Indikator Kinerja Pembangunan. Jakarta: Kedupatian Evaluasi Kinerja Pembangunan, Bappenas
- Bintoro Tjokroamidjojo. (2014). Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)
- Fahmi Ahmada (2009). Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Kasus pada BAPPEDA Pemerintah Kota Blitar).
- Friedman, John. (1987). Planning in The Public Domain (From Knowledge to. Action). Princeton University Pers. Glass
- Halim, A. (2014). Analisis Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, 2(2).
- Korten, David, C, 1988. Community Organization and Rural Development A Learning Process Approach, In Public Administration Review.76(2),351- 362.

- Mahsun, M. 2018. Pengukuran Kinerja Sektor Publik (Pertama). Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
- Moleong, Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Pasolong, Harbani. 2019. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Riyadi dan Bratakusumah Deddy Supriady. 2004. Perencanaan Pembangunan. Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia
- Siregar Kiki Hardiansyah (2020). Peranan Badan perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan.
- Sugiyono. 2018. Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Wicaksono Agus & Sugiarto Budi. 2005. Modul Studio Perencanaan Desa. Malang: PPSUB.
- Yonasi Permai Sari.A. 2021. Optimalisasi Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Dalam Perencanaan Partisipatif Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kabupaten Barito Utara.